

## ABSTRAK

### **Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Undang-undang Di Indonesia**

**(Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 )**

**Oleh: Yoga Pratama Widiyanto, Zainuri, Abshoril Fithry**

Keberadaan DPRD yang merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak memiliki wewenang dan kekuatan hukum untuk ikut serta membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat ataupun menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah.

Menelisik mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan Undang-undang di Indonesia dan urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembentukan Undang-undang di Indonesia merupakan rumusan masalah yang harus dipecahkan dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.

Berdasarkan penelusuran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata DPRD tidak memiliki kedudukan yang dalam hal ini meliputi wewenang, tugas dan fungsi untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Maka perlu adanya amandemen mengenai tugas, fungsi dan wewenang DPRD agar memiliki kekuatan hukum untuk bisa berpartisipasi membentuk peraturan perundang-undangan serta menyampaikan aspirasi masyarakat di daerahnya.

*Kata Kunci: Undang-undang, Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

## ABSTRACT

### **The Urgency of the Regional People's Legislative Assembly in Delivering Community Aspirations Against the Establishment of Laws in Indonesia**

**(Law Number 13 of 2019 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning MD3)**

**By: Yoga Pratama Widiyanto, Zainuri, Abshoril Fithry**

The form of DPRD which is a forum for accommodating and channeling the aspirations of the people does not have the authority and legal force to participate in forming laws and regulations at the central level or to convey the aspirations of the people in the regions.

Examining the position of the Regional People's Representative Council (DPRD) in making laws in Indonesia and the urgency of the Regional People's Representative Council (DPRD) in conveying aspirations for the formation of a constitutional society in Indonesia is a formulation of the problem that must be defended in this thesis.

The research method used is normative legal research. Normative legal research is research conducted to collect and analyze secondary data.

Based on tracing through the applicable laws and regulations, it turns out that the DPRD does not have a position which in this case includes the authority, duties and functions to participate in drafting laws and regulations at the central level.

So it is necessary to amend the duties, functions and authorities of the DPRD so that it has legal force to be able to participate in forming laws and regulations and conveying the aspirations of the people in their area.

**Keywords:** *Constitution, Aspirations, Regional People's Representative Assembly*